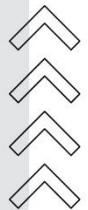




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jl. Terpadu, Selatpanjang
Telp. (0763) 8001555 / Fax. (0763) 8001555
Website : dinsos.merantikab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 dengan baik.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, 3 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



SUKRI, SE
Pembina / (IV.a)
NIP. 19800401 200012 1 001

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	4
1.4 Landasan Hukum	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis.....	7
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2 Realisasi Anggaran	33
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	36
BAB IV PENUTUP.....	40
LAMPIRAN.....	42
1. PPKS yang Tertangani	43
2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan Terpadu	44
3. Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	45
4. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR).....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan dan Sasaran DINSOS PPPA PPKB	9
Tabel 1.2	Rencana Kinerja Tahun 2023	10
Tabel 1.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 2.3	Perbandingan Capaian Kinerja	21
Tabel 2.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	22
Tabel 2.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	23
Tabel 2.6	Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota Lainnya.....	25
Tabel 2.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program.....	26
Tabel 3.1	Capaian Anggaran Program.....	33
Tabel 4.1	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran	37
Tabel 4.2	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	3
--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata kerja

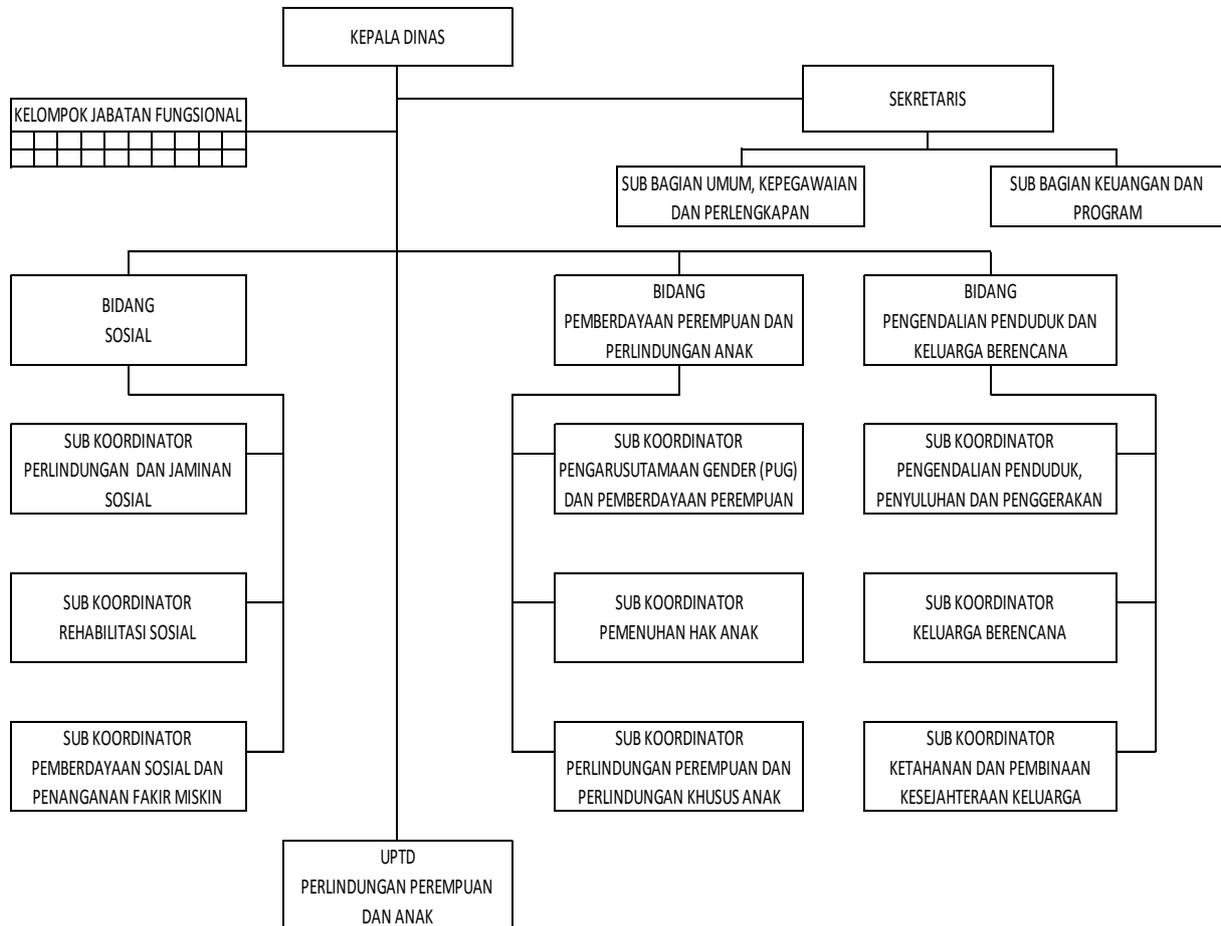
Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 23 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan Dan Program.
- c) Bidang Sosial, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan dan jaminan Sosial;
 2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi Sosial;
 3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- d) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemenuhan Hak Anak;
 3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
- e) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keluarga Berencana;
 3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketahanan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- f) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas sosial PPPA PPKB adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b) Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3 Aspek Strategis dan Serta Permasalahan Utama

Pesatnya perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan adanya berbagai kegiatan dibidang ekonomi, mempunyai implikasi yang luas dan diprediksikan akan muncul berbagai permasalahan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk yang semakin kompleks. Sebagian besar masyarakat kelas bawah kurang bahkan tidak memiliki akses terhadap gerak vertikal pembangunan ekonomi tersebut.

Sebagian masyarakat justru tertinggal oleh derap pembangunan. Kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran dan keterbelakangan merupakan isu-isu sensitif dan kritis dalam tatanan sosial saat ini. Untuk itu pembangunan Bidang Kesejahteraan sosial tetap dikelola dengan mengacu kepada pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) dalam konteks dan dinamika pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Secara umum isu-isu strategi yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyita perhatian adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan layanan Pemberdayaan Sosial.
- b. Masih rendahnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Belum Optimalnya Pelayanan Rehabilitas sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar.
- d. Masih Rendahnya Cakupan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.
- e. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak.
- f. Masih Rendahnya Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR).
- g. Belum Optimalnya Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1842);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 No. 5); dan
9. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 No. 23)

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi tentang Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang Penutup Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis (*strategic plan*) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada, sebagai dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional dan internasional.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti diawali dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan external, serta pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang diidentifikasi melalui analisa SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Selain itu juga diperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan membangun prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah melibatkan pegawai di lingkungan Dinas yang menempatkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti beserta seluruh perangkat organisasinya untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti mencakup tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tujuan dan Sasaran DINSOS P3AP2KB
Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN						
				SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	N/A	15	20	33	67	93
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	15	18	20	25	29
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Angka Kemiskinan	%	25,28	24,61	22,10	19,50	19	18
		Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	%	77	79	88	91	93	95
		Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15
3.	Meningkatkan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender	%	86,30	86,40	86,50	87,50	87,90	88,56
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	%	96	97	100	100	100	100
			Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	5,06	6,11	7,90	9,70	10,51	11,23

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 ini disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (RENSTRA) serta berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Rencana Kinerja Tahun 2023 DINSOS PPPA PPKB
Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	4.060.673.515
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Dokumen	22.486.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.447.541.251
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	404.047.000
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	936.799.564
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	249.799.700
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	78 %	192.632.000

2.1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil	40 %	20.000.000
2.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	71 %	172.632.000
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30.178 Orang	366.163.000
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	26 %	310.000.000
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 %	56.163.000
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	2.327.489.600
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah Padan dengan data Kependudukan	89 %	2.327.489.600
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	90 %	210.288.000
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	160.210.000
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	30 Orang	50.078.000

6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	30 %	150.000.000
6.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	30 %	50.000.000
6.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 %	50.000.000
6.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	50.000.000
7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	414.818.492
7.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Ratio KDRT	0,007 %	224.499.992
7.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang di sediakan	100 %	88.658.500
7.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	101.660.000

8	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkat kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	115 Lembaga	126.000.000
8.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	126.000.000
9	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfrehensif	100 %	345.033.394
9.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang di sediakan	100 %	295.033.394
9.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	50.000.000
10	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	1 %	168.200.000
10.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2 Kegiatan	50.000.000
10.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	118.200.000
11	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	2.095.125.950

11.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Kegiatan	786.485.000
11.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100 %	587.018.950
11.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	38 %	309.622.000
11.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %	412.000.000
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	73 %	2.176.100.000
12.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80 %	2.096.100.000
12.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	66 %	80.000.000
	Jumlah			12.632.523.951

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Tujuan dari pada penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023:

Tabel 1.3
Perjanjian Kinerja tahun 2023 DINSOS PPPA PPKB
Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	18
2.	Meningkatnya penanganan PSKS terhadap PSKS	Persentase PSKS yang tertangani	Percent (%)	88

3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	Percent (%)	100
		Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	Percent (%)	7,90
4.	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengukuran atas indikator kinerja utama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama DINSOS PPPA PPKB
Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	18	N/A	N/a	-	-
2	Meningkatnya penanganan terhadap PSKS	Persentase PPKS yang tertangani	88%	90%	102%	Sangat Tinggi	Bidang Sosial
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	7,90%	9,60%	122%	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,18	1,93	112%	Sangat Tinggi	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adapun analisis capaian kinerja berdasarkan tabel capaian kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk sasaran meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 tidak ada capaian dan realisasi hal ini di karenakan adanya perubahan konsep dari RB General menjadi RB Tematik sehingga untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada tingkat Perangkat Daerah tidak lagi di laksanakan dan untuk itu yang dapat kami jelaskan disini adalah Kinerja yang menunjang dalam pengoptimalan kualitas Manajemen Kinerja pada Perangkat Daerah yaitu capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah dimana untuk penilaian Nilai AKIP Perangkat Daerah yang di laksanakan pada tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah, Dinas SosialPPPAPPKB mendapatkan nilai 77,85 dan juga mengenai Kinerja Penginputan RUP pada Aplikasi SIRUP berdasarkan rekomendasi dari BPK dan Inspektorat dimana capaian dari pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar 99,62%. Oleh karenanya, untuk tahun berikutnya perlu mengganti tujuan, sasaran serta indikator yang menunjang dalam pengoptimalan kualitas Manajemen Kinerja pada Perangkat Daerah.
2. Untuk Sasaran Meningkatnya Penanganan terhadap PPKS meskipun pada tahun 2023 ini telah melebihi target yang telah di tetapkan, namun perlu mempertahankan serta meningkatkan lagi kinerja yang telah di capai. Hal ini di karenakan Data PPKS tersebut bergerak dinamis yang mana data tersebut harus terus di mutakhirkan secara berkala sehingga memungkinkan adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah PPKS yang terdata sesuai dengan perubahan social dari waktu ke waktu baik dari segi populasi, permasalahan yang muncul maupun persebarannya.
3. Untuk sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 ini telah mencapai target yang telah di tetapkan. Hal ini di karenakan seluruh pengaduan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang masuk ke UPTD perlindungan perempuan dan anak seluruhnya dapat tertangani dan di selesaikan dengan baik. Selain itu juga adanya peningkatan partisipasi Perempuan yang bekerja pada lembaga Pemerintah.
4. Untuk Sasaran Terkendalinya Jumlah Penduduk pada tahun ini sesuai dengan Perhitungan Mandiri untuk Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) telah mencapai target yang telah di tetapkan dimana terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas, namun Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) ini masih menunggu perhitungan resmi yang di keluarkan oleh BKKBN.

Tabel 2.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	15	18,45	123%	18	N/a	N/a
2	Meningkatnya penanganan terhadap PSKS	Persentase PPKS yang tertangani	79%	88%	111%	88%	90%	102%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	97%	100%	103%	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	6,11%	7,56%	123%	7,90%	9,60%	122%
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,19	2,22	99%	2,18	1,93	112%

Tabel 2.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4/5*100</i>
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/a	29	N/a
2	Meningkatnya penanganan terhadap PSKS	Persentase PPKS yang tertangani	90%	95%	95%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Perempuan Pemerintah Dilembaga	9,60%	11,23%	85%
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	1,93	2,15	111%

Tabel 2.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang di lakukan
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	18	N/a	N/a	Tidak adanya Realisasi dan Capaian target Kinerja pada Indikator ini di karenakan adanya perubahan konsep dari RB General menjadi RB Tematik sehingga untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada tingkat Perangkat Daerah tidak lagi di laksanakan.	Perlu mengganti tujuan, sasaran serta indikator yang menunjang dalam pengoptimalan kualitas Manajemen Kinerja pada Perangkat Daerah.
2	Meningkatnya penanganan terhadap PSKS	Persentase PPKS yang tertangani	88%	90 %	102%	Adanya Kolaborasi dan Kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah Lainnya baik itu di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional dalam upaya penanganan masalah-masalah terkait Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), namun demikian masih terdapat sedikit permasalahan yaitu masih adanya penanganan yang belum tepat sasaran.	Mensosialisasikan terhadap Perangkat Desa terkait Kriteria Masyarakat yang bisa dimasukka kedalam data DTKS serta melakukan Verifikasi dan Validasi data DTKS secara berkala

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang di lakukan
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	Adanya Upaya Bersama Berbagai Pihak baik itu pihak Kepolisian, Kejaksaan serta pihak terkait lainnya dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun dalam penanganan kasus terkada belum berjalan Optimal, hal ini dikarenakan di Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki tenaga ahli dalam perlindungan Perempuan dan Anak.	Mendatangkan Tenaga Ahli dari Luar Daerah atau merujuk Klien keluar daerah yang memiliki tenaga ahli dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak.
		Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	7,90%	9,60%	122%	Adanya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meninjau ulang target sasaran yang ada pada Renstra agar di tingkatkan lagi pada tahun berikutnya.
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,18	1,93	112%	Kerjasama dengan pihak-pihak terkait serta sosialisasi yang masif terhadap pasangan usia subur dalam rangka menurunkan angka kelahiran sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas	Untuk realisasi pada indikator ini masih menunggu hasil perhitungan resmi yang di keluarkan oleh BKKBN

Tabel 2.6
Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya	% Capaian
1	2	3	4	5	6 = 4/5 *100
1.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/a	83 (Nasional)	N/a
2.	Meningkatnya penanganan terhadap PSKS	Persentase PPKS yang tertangani	90 %	88 % (Kabupaten Bengkalis)	102%
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	100%	90 % (Kabupaten Indragiri Hulu)	111%
		Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	9,60%	-	-
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	1,93	2,21 (Nasional)	115%

Tabel 2.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/a	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, Peralatan, Barang dan Jasa Penunjang Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	98%	Program ini di katakan cukup berhasil dalam memberikan pemenuhan kebutuhan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi, namun demikian belum bisa di kaitkan dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2023 ini tidak di lakukan penilaian lagi pada Perangkat Daerah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
2	Meningkatnya penanganan terhadap PSKS	Persentase PPKS yang tertangani	102%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS dan KAT yang Di tangani	115%	Program ini menunjang capaian Penanganan terhadap PPKS, hal ini di karenakan adanya kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi dalam Penanganan terhadap Komunitas Adat Terpencil.
				Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang didata dan di Rehabilitasi	90%	Program ini bisa di katakan cukup berhasil dalam menunjang pencapaian Persentase PPKS yang tertangani, hal ini di karenakan, alokasi anggaran daerah untuk rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS tidak sebanding dengan Jumlah PMKS yang terdata

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
							yang membutuhkan layanan Rehabilitasi Sosial.
				Program perlindungan dan Jaminana Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	102%	Program ini cukup dikatakan berhasil dalam menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Penanganan terhadap PPKS, dimana pada program ini masyarakat miskin mendapatkan bantuan sosial baik yang bersumber dari APBN yang mana dinas sosial selaku pengelola data KPM yang berhak menerima bantuan dari pemerintah pusat dan juga bantuan yang bersumber dari APBD.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
				Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan	111%	Program ini berhasil dalam menunjang capaian sasaran yang mana seluruh laporan terkait bencana yang masuk dapat tertangani dengan baik.
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	100%	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	Program ini dikatakan berhasil menunjang capaian sasaran kinerja, hal ini dikarenakan seluruh pengaduan yang masuk terkait kasus kekerasan terhadap perempuan telah di tindak lanjuti.
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkat kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	92%	Program ini di katakan cukup berhasil dalam menunjang pencapaian sasaran kinerja, hal ini di karenakan adanya peningkatan kualitas hidup anak

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
							melalui penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Kepulauan Meranti.
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konprehensif	100%	Program ini dikatakan berhasil menunjang capaian sasaran kinerja, hal ini dikarenakan seluruh pengaduan yang masuk terkait kasus kekerasan terhadap anak telah di tindak lanjuti.
		Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	100%	Program ini cukup berhasil dalam menunjang sasaran kinerja, namun masih ada beberapa yang perlu di perbaiki terkait peningkatan SDM yang berkompeten dalam Penyusunan Rencana Aksi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
							Daerah (RAD) pelaksanaan PUG
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	112%	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan di manfaatkan dalam pengambilan Kebijakan	100%	Program ini berhasil dalam menunjang pencapaian Kinerja Sasaran yang mana telah terlaksananya telah adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta perkiraan pengendalian kuantitas penduduk.
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	87%	Program ini cukup berhasil dalam menunjang Capaian Kinerja Sasaran yang mana adanya pelaksanaan Advokasi dan KIE terkait pentingnya ber KB serta ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
							memenuhi kebutuhan masyarakat, namun masih perlu peningkatan kinerja yang mana perlu adanya peningkatan kompetensi dari tenaga kesehatan yang melakukan pemasangan alat Kontrasepsi Metode Modern (m-CPR)
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	79%	Program ini tidak begitu berhasil menunjang capaian kinerja sasaran, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dari pada Kelompok Kegiatan (poktan) yang melakukan pembinaan keluarga, untuk itu kedepannya perlu adanya peningkatan kompetensi

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program. Adapun Capaian Realisasi penggunaan anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun Anggaran 2023 adalah mencapai 92% dari total jumlah anggaran yaitu Rp., - yang bersumber dari APBD berjumlah Rp. 7.965.651.951,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berjumlah Rp. 4.666.872.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Anggaran Program Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota	4.060.673.515	3.763.510.048	93%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.486.000	22.152.400	99%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.447.541.251	2.276.417.796	93%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.047.000	366.237.710	91%
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936.799.564	856.390.142	91%
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.799.700	242.312.000	97%
2	Program Pemberdayaan Sosial	192.632.000	160.792.000	83%
2.1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	20.000.000	17.474.000	87%
2.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	172.632.000	143.318.000	83%
3	Program Rehabilitasi Sosial	366.163.000	174.384.000	48%
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	310.000.000	124.121.000	40%
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	56.163.000	50.263.000	89%
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.327.489.600	2.272.907.150	98%

4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.327.489.600	2.272.907.150	98%
5	Program Penanganan Bencana	210.288.000	47.360.000	23%
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	160.210.000	13.426.000	8%
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	50.078.000	33.934.000	68%
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	150.000.000	139.284.000	93%
6.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	45.210.000	90%
6.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	47.748.000	95%
6.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	46.326.000	93%
7	Program Perlindungan Perempuan	414.818.492	361.494.142	87%
7.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	224.499.992	220.973.992	98%
7.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	88.658.500	41.876.500	47%
7.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000	98.643.650	97%
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	126.000.000	121.476.600	96%
8.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	126.000.000	121.476.600	96%
9	Program Perlindungan Khusus Anak	345.033.394	270.106.000	78%
9.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	295.033.394	223.074.000	76%
9.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	50.000.000	47.032.000	94%

	Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
10	Program Pengendalian penduduk	168.200.000	124.704.390	74%
10.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	50.000.000	48.520.000	97%
10.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	118.200.000	76.184.390	64%
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana	2.095.125.950	1.989.456.000	95%
11.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	786.485.000	742.707.000	94%
11.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	587.018.950	583.874.000	99%
11.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	309.622.000	250.875.000	81%
11.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	412.000.000	412.000.000	100%
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.176.100.000	2.139.247.899	98%
12.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.096.100.000	2.059.247.899	98%
12.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80.000.000	80.000.000	100%
	JUMLAH	12.632.523.951	11.564.722.229	92%

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi Penggunaan Anggaran di lakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran, dimana pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang di butuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program yang telah di capai berdasarkan alokasi per target yang di rencanakan. Adapun tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk mencapai target Indikator tujuan dan sasaran serta Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat di lihat pada table 4.1 di bawah.

Adapun rumus untuk menghitung tingkat efisiensi penggunaan anggaran yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yaitu sebagai berikut :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Tabel 4.1
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	18	N/a	N/a	4.060.673.515	3.763.510.048	93%	-
2	Meningkatnya penanganan terhadap PPKS	88%	90%	102%	3.096.572.600	2.655.443.150	86%	16%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	100%	100%	885.851.886	753.076.742	85%	17%
		7,90%	9,60%	122%	150.000.000	139.284.000	93%	
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	2,18	1,93	112%	4.439.425.950	4.253.408.289	96%	16%

Pada tabel 4.1 diatas dapat di lihat Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam mencapai seluruh target sasaran Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana rata-rata 16%. Oleh karenanya rekomendasi yang dapat di berikan pada tahun berikutnya adalah untuk menaikkan target kinerja sasaran yang ada pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan meranti.

Selanjutnya untuk melihat Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang di gunakan untuk mencapai Target Program yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2023

No.	Program	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	93%	98%	4.060.673.515	3.763.510.048	93%	5%
2	Program Pemberdayaan Sosial	78%	90%	115%	192.632.000	160.792.000	83%	32%
3	Program Rehabilitasi Sosial	30.178 Orang	27.224 Orang	90%	366.163.000	174.384.000	48%	42%
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	87%	102%	2.327.489.600	2.272.907.150	98%	4%
5	Program Penanganan Bencana	90%	100%	111%	210.288.000	47.360.000	23%	88%
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	30%	30%	100%	150.000.000	139.284.000	93%	7%
7	Program Perlindungan Perempuan	100%	100%	100%	414.818.492	361.494.142	87%	13%
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	115 Lembaga	106 Lembaga	92%	126.000.000	121.476.600	96%	(4%)
9	Program Perlindungan Khusus Anak	100%	100%	100%	345.033.394	270.106.000	78%	22%
10	Program Pengendalian penduduk	1%	1%	100%	168.200.000	124.704.390	74%	26%
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana	72%	62,92%	87%	2.095.125.950	1.989.456.000	95%	(8%)
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	73%	58%	79%	2.176.100.000	2.139.247.899	98%	(19%)

BAB V

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti ini disusun dengan merujuk kepada Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021 - 2026 yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dalam Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersumber dari dana APBD dan APBD-P, telah sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti serta mendukung kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dari hasil evaluasi kinerja program, menunjukkan bahwa program yang dicanangkan telah memenuhi kriteria “*Berhasil*”.

Namun dibalik keberhasilan yang telah diperoleh oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya pembangunan di bidang Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, masih ditemui beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- a. Belum Optimalnya Upaya yang di lakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan masih adanya pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial yang belum tepat sasaran.
- b. Belum maksimalnya pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah.
- c. Minimnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat.
- d. Belum Opimalnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak yang di laksanakan, hal ini di karenakan di Kabupaten Kepulauan Meranti belum Memiliki Tenaga Ahli yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti Psikolog sehingga perlu mendatangkan tenaga Ahli dari luar daerah ataupun merujuk Klien keluar daerah yang akan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih.
- e. Masih kurangnya tenaga kesehatan di Faskes yang dapat melakukan pemasangan alat Kontrasepsi Modern (m-CPR)

Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Kepulauan Meranti, maka upaya-upaya ke depan yang perlu dilaksanakan adalah :

- a. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala guna meminimalisir pemberian bantuan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat yang tidak tepat sasaran.
- b. Menindaklanjuti segala rekomendasi-rekomendasi yang di berikan oleh tim evaluator terkait upaya-upaya yang harus di lakukan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah.
- c. Peningkatan kualitas sarana dan Prasarana pendukung kinerja Pelayanan.
- d. Kedepannya agar pemerintah Daerah dapat menyediakan Tenaga Ahli khususnya Psikolog untuk dapat melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
- e. Melakukan peningkatan kompetensi terkait pemasangan alat Kontrasepsi Modern (m-CPR) bagi tenaga kesehatan di Faskes

LAMPIRAN

1. PPKS yang Tertangani :

$$\begin{aligned} \text{Persentase PMKS yang Tertangani} &= \frac{\text{Jumlah PMKS yang Tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\% \\ &= \frac{147.026}{162.492} \times 100\% \\ &= 90\% \end{aligned}$$



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Alamat : Jl. Terpadu No. Telp. (0763) 8001555 Fax. (0763) 8001555
SELATPANJANG Kode Pos 28753

PMKS Yang Tertangani

No.	PMKS	Tahun 2023							
		TW 1		TW 2		TW3		TW4	
		Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani
1	Anak Balita Terlarant	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Anak Terlarant	-	-	-	-	15	15	16	16
3	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	8	8	10	10	20	20	27	27
4	Anak Jalanan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak dengan Kedisabilitasan	15	15	15	15	15	15	15	15
6	Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan atau di perlakukan salah	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lanjut Usia Terlarant	1.364	382	1.364	382	1.364	514	1.364	516
9	Penyandang Disabilitas	1.291	52	1.291	52	1.291	101	1.291	120
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengemis	-	-	-	-	3	3	3	3
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasayarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan Nafza	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	-	-	9	9	9	9	11	11
22	Korban Bencana Sosial	3	3	7	7	12	12	17	17
23	Perempuan rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Fakir Miskin	158.580	147.230	158.038	152.001	156.483	147.326	156.947	145.908
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	1.890	393	1.890	393	1.892	393	2.801	393
Jumlah		163.151	148.083	162.624	152.869	161.104	148.408	162.492	147.026
Persetase		91%		94%		92%		90%	

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Kepulauan Meranti



SUKRI SE
 PEMBINA / IV.a
 NIP. 19800401 200012 1 001

2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu :

$$\begin{aligned} & \text{Cakupan perempuan dan anak} && \text{Jumlah Pengaduan/laporan yang} \\ & \text{korban kekerasan yang} && \text{ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan} \\ & \text{mendapatkan penanganan} &= & \frac{\text{Terpadu}}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang}} \times 100\% \\ & \text{pengaduan oleh petugas terlatih} && \text{masuk ke Unit pelayanan terpadu} \\ & \text{di dalam Unit pelayanan terpadu} && \\ & && = \frac{46}{46} \times 100\% \\ & && = 100\% \end{aligned}$$

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Alamat : Jl. Terpadu No. Telp. (0763) 8001555 Fax. (0763) 8001555
 SELAT PANJANG Kode Pos 28753

LAPORAN PENGADUAN KASUS PADA PEREMPUAN DAN ANAK
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	BENTUK KASUS	2023											
		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		Anak	PR	Jumlah	Anak	PR	Jumlah	Anak	PR	Jumlah	Anak	PR	Jumlah
1	Kekerasan Fisik/ Psikis (KDRT)	0	0	0	0	3	3	1	1	2	1	0	1
2	Penelantaran (KDRT)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	Kekerasan Psikis (Non KDRT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	Kekerasan Fisik (Non KDRT)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
5	Kekerasan Seksual	6	0	6	3	1	4	6	1	7	4	1	5
6	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pernikahan Dini	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bukan Kekerasan													
9	ABH (Anak Pelaku tanpa korban)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
10	Hak Asuh	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PSM, Hak Pendidikan, Hak Identitas, dll	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
12	Adopsi	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3
13	Bukan Kekerasan (Hak Asuh, Hak Pendidikan, ABH, dll)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Jumlah		9	2	11	4	5	9	11	3	14	11	1	12

No.	VARIABEL/ INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Jumlah Pengaduan/ Laporan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Yang Ditindaklanjuti UPTD PPA	11	20	34	46
2	Jumlah Pengaduan/ Laporan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Yang Masuk Ke UPTD PPA	11	20	34	46
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam UPTD PPA	100%	100%	100%	100%

Selatpanjang, 29 Desember 2023
 PIt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Kepulauan Meranti



3. Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah :

$$\begin{aligned} \text{Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah} &= \frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\% \\ &= \frac{3.316}{33.821} \times 100\% \\ &= 9,60\% \end{aligned}$$

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN							
		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	ASN yang menempati jabatan eselon II	18	1	21	1	21	1	23	1
2	ASN yang menempati jabatan eselon III	90	33	88	33	86	30	95	29
3	ASN yang menempati jabatan eselon IV	116	66	116	66	115	63	123	64
4	ASN yang tidak menduduki jabatan	999	1.517	992	1.509	975	1.485	947	1.477
5	Jumlah PPPK	101	166	101	166	259	577	278	584
6	Jumlah tenaga Honorar	1.398	1.209	1.450	1.346	1.450	1.346	1.463	1.161
JUMLAH		2.722	2.992	2.768	3.121	2.906	3.502	2.929	3.316

Sumber : BKPSDM Kab. Kepulauan Meranti

No.	URAIAN	JUMLAH			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Data Pekerja Perempuan	34.525	34.525	34.525	34.525
2	Data pekerja Anak dibawah umur 18 Tahun	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kop. UKM dan Tenaga Kerja Kab. Kepulauan Meranti

Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah = $\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100\%$

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

No.	Keterangan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.922	3.121	3.502	3.316
2	Jumlah Pekerja Perempuan	34.525	34.525	34.525	34.525
	Persentase	8,46%	9,04%	10,14%	9,60%

Selatpanjang, 29 Desember 2023
 PIt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
 dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Kepulauan Meranti


SUKRI SE
 Pembina/ IV.a
 NIP. 19800401 200012 1 001

4. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Alamat : Jl. Terpadu No. Telp. (0763) 8001555 Fax. (0763) 8001555
SELATPANJANG Kode Pos 28753

1 **Angka Kelahiran Total** 2.685 (Sasaran Peserta KB Pasca Persalinan)

Angka Kelahiran Kotor CBR = $\frac{\text{Total Kelahiran Hidup}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1.000$

CBR = $\frac{2.685}{211.791} \times 1.000$

CBR = 12,68

2 **ASFR (AGE SPESIFIC FERTILITY RATE)**

Umur Wanita (1)	Jumlah Penduduk (2)	Jumlah Kelahiran (3)	ASFRi (4) = (3)/(2) x 1000
15-19	8.079	159	19,74
20-24	7.284	638	87,58
25-29	6.576	811	123,28
30-34	6.905	492	71,21
35-39	6.992	266	38,01
40-44	6.794	186	27,39
45-49	5.592	106	19,01
Jumlah	48.222	2.658	386,23

* Sumber Data BPS Kepulauan Meranti dalam Angka dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

3 **TFR =** $\frac{5 \sum \text{ASFRi}}{1.000}$

= $\frac{5 (386,23)}{1.000}$

TFR = 1,93

4 **CPR =** $\frac{\text{PA}}{\text{PUS}}$

= $\frac{20.506}{32.590} \times 100\%$

CPR = 62,92%

Selatpanjang, 29 Desember 2023
 Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Kepulauan Meranti



Sakri SE
 Pembina / IV.a
 NIP. 19800401 200012 1 001

5. Nilai AKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100. Berdasarkan hasil evaluasi kami pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 77,85 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30.00	22,80
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11,85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	77,85
	Predikat		BB

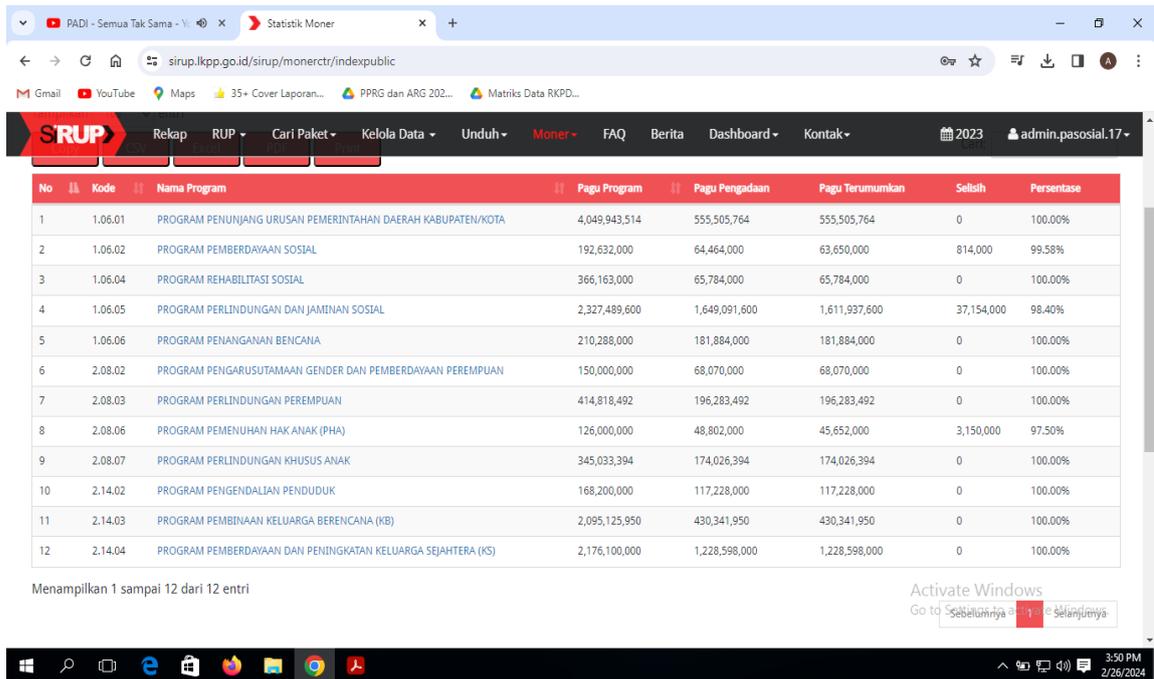
Capaian nilai sebesar 77,85 tersebut termasuk ke dalam kategori "BB", yang diinterpretasikan sebagai "SANGAT BAIK" dalam pengelolaan kinerjanya. Terhadap permasalahan yang akan saudara tindak lanjuti agar disampaikan ke Inspektoria Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

RAWELLY ANELIA, S.STP, M.Si
Pembina TK./ IV.b
NIP 19820916 200012 1 004

6. Kinerja Penginputan RUP pada Aplikasi SIRUP



The screenshot displays the SIRUP application interface. At the top, there is a navigation bar with the SIRUP logo and various menu items: Rekap, RUP, Cari Paket, Kelola Data, Unduh, Moner, FAQ, Berita, Dashboard, and Kontak. The year 2023 and the user name 'admin.pasosial.17' are also visible. Below the navigation bar is a table with 12 rows of data. The table has the following columns: No, Kode, Nama Program, Pagu Program, Pagu Pengadaan, Pagu Terumumkan, Selsih, and Persentase. The data in the table is as follows:

No	Kode	Nama Program	Pagu Program	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selsih	Persentase
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,049,943,514	555,505,764	555,505,764	0	100.00%
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	192,632,000	64,464,000	63,650,000	814,000	99.58%
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	366,163,000	65,784,000	65,784,000	0	100.00%
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2,327,489,600	1,649,091,600	1,611,937,600	37,154,000	98.40%
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	210,288,000	181,884,000	181,884,000	0	100.00%
6	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	150,000,000	68,070,000	68,070,000	0	100.00%
7	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	414,818,492	196,283,492	196,283,492	0	100.00%
8	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	126,000,000	48,802,000	45,652,000	3,150,000	97.50%
9	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	345,033,394	174,026,394	174,026,394	0	100.00%
10	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	168,200,000	117,228,000	117,228,000	0	100.00%
11	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,095,125,950	430,341,950	430,341,950	0	100.00%
12	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,176,100,000	1,228,598,000	1,228,598,000	0	100.00%

Menampilkan 1 sampai 12 dari 12 entri

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.